

**RENCANA AKSI KINERJA TAHUN 2023 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
KOTA PADANG PANJANG**

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target Kegiatan	ALASAN (PERMASALAHAN YANG AKAN DISELESAIKAN)	Rencana Aksi	Anggaran (Rp)	Penanggung Jawab	Jadwal Kegiatan				Ket
														TW I	TW II	TW III	TW IV	
1	2	3	4	5	6	6		7	8		9	10	11	12	13	14	15	16
1		Opini Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Penyusunan laporan Keuangan Daerah Yang Tepat waktu dan sesuai SAP	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD, dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun	7 Dokumen	Adanya Beberapa Laporan Keuangan OPD yang belum sesuai dengan Sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.	Mengkonsolidasikan Laporan Keuangan OPD tepat waktu dan menyajikannya sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum sehingga dihasilkan laporan keuangan yang dapat diyakini kewajarannya tanpa pengecualian	37.828.000						
											asistensi Penyusunan Laporan Keuangan OPD dalam rangka percepatan penyusunan Laporan Keuangan OPD							
2	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	Ketepatan Penyajian Laporan keuangan Sesuai SAP	Tepat	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS	2 Dokumen	Pemanfaatan aplikasi untuk penyusunan RKPd dan KUA PPAS belum terintegrasi	Pengintegrasian RKPd OPD dengan KUA PPAS melalui SIPD	116.949.850						
							Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS Perubahan	2 Dokumen	Pemanfaatan aplikasi untuk penyusunan RKPd dan KUA PPAS belum terintegrasi	Pengintegrasian RKPd Perubahan OPD dengan KUA PPAS Perubahan melalui SIPD	116.350.200						
							Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Dokumen Ranperda dan Perda APBD TA 2024 serta Ranperwako dan Perwako Penjabaran APBD TA 2024 dan Buku Perwako Pergeseran TA 2023 serta Dokumen	6 Dokumen	Karena Adanya Batasan Waktu dalam Penyampaian Dokumen APBD yang diatur oleh Permendagri Nomor 64 tahun 2020	Percepatan Penyusunan APBD tahun 2023 sesuai jadwal yang ditetapkan oleh Permendagri nomor 64 tahun 2020 serta Menjaring dan membahas usulan standar biaya dengan tim	347.604.900						
							Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Dokumen Ranperda dan Perda Perubahan serta Ranperwako dan Perwako Perubahan APBD	4 Dokumen	Karena Adanya Batasan Waktu dalam Penyampaian Dokumen Perubahan APBD yang diatur oleh Permendagri Nomor 03 Tahun 2019	Percepatan Penyusunan perubahan APBD 2022 sesuai dengan Permendagri Nomor 3 tahun 2019 yang paling lambat ditetapkan 3 bulan sebelum tahun anggaran berakhir	123.611.150						

					Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pematangan atas SP2D dengan instansi terkait	Jumlah Dokumen laporan data hasil rekonsiliasi keuangan daerah	11 dokumen	Masih adanya Perbedaan kaca mata keuangan antara Pengelola Keuangan Daerah pada OPD di lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang	Koordinasi antar stake holder pengelolaan keuangan daerah	4.000.000						
								Jumlah rekonsiliasi pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan	8 Kali									
							Penyusunan Petunjuk teknis administrasi keuangan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas serta penatausahaan dan pertanggungjawaban kegiatan	Peraturan kepala daerah tentang Sistem dan Prosedur Penatausahaan Keuangan Daerah	1 Perwako	Belum adanya Perwako yang mengatur sistim dan prosedur pengelolaan keuangan di Padang Panjang sejak dicabutnya PP No.8 dan PMDN No.13	Menyusun Sisdur Penatausahaan keuangan daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan pengajuan Ranperda dalam program legislatif daerah, menyusun Perda sesuai dengan peraturan terbaru tentang pengelolaan keuangan daerah	36.718.600						
					Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Dokumen informasi data laporan SKPD yang akurat per triwulan Daerah	2 Dokumen	Masih adanya kesalahan dalam menyampaikan laporan triwulan SKPD	Verifikasi SPJ OPD dan mengkonsolidasikan laporan triwulan SKPD yang tepat waktu	7.888.000						
							Penyusunan Kebijakan dan Panduan teknis operasional penyelenggaraann akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen kebijakan akuntansi yang disusun	1 Dokumen	Masih adanya beberapa permasalahan dalam menyusun kebijakan akuntansi yang belum sesuai dengan peraturan yang berlaku	Menyusun kebijakan akuntansi dan panduan teknis operasional sesuai dengan peraturan yang berlaku	8.891.850						
							Koordinasi dan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/ kota	Jumlah dokumen Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	2 Dokumen	Target dan Aturan dalam menyusun Ranperda Pertanggung jawaban	Menyusun Ranperda pertanggungjawaban APBD yang tepat waktu sesuai aturan yang berlaku	21.330.050						

					Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah dana yang dicairkan	1 tahun	Untuk Pencairan dana darurat ada beberapa hal-hal yang harus di lengkapi dan disiapkan karena dana tersebut di butuhkan pada kondisi-kondisi tertentu dan tidak bisa di pekirakan waktunya	Menyiapkan kelengkapan persyaratan persayaratn pencairan dana darurat	2.000.000.000						
					Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Penyusunan standar harga	Jumlah Dokumen Standar Satuan Harga yang dicetak	2 Dokumen	Adanya perbedaan harga antara Data OPD dengan harga di Pasar	Meminta Data Ke OPD dan Melakukan survei ke Toko-Toko dan Penyedia	14.267.650						
							Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen RKBMD dan RKPMD tahun 2023 serta dokumen Perubahan RKBMD dan RKPMD tahun 2022 Kota Padang Panjang	2 Dokumen	Sebagai persyaratan untuk penganggaran Belanja modal di masing-masing OPD	Melakukan koordinasi kepada seluruh OPD dalam penyusunan RKBMD dan DKPBMD dan memerintahkan kepada seluruh OPD untuk menyampaikan laporan tepat waktu	14.560.050						
							Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen laporan semesteran dan tahunan aset yang disusun	2 Dokumen	Adanya Beberapa OPD yang memberikan Laporan aset yang tidak sesuai dengan format maupun waktu yang ditentukan	Memberitahukan kepada seluruh OPD agar mengirim laporan semester dan tahunan tepat waktu	56.117.300						
							Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Premi asuransi barnag milik daerah yang diasuransikan Jumlah tanah yang disewakan untuk kepentingan publik	3 Polis 4 kapling	Bahan-bahan yang disediakan kepada tim Pokja pengadaan barang jasa harus bisa secepatnya di lengkapi saat tim Pokja melakukan lelang maupun survei	Menyiapkan dan melaporkan kelengkapan bahan yang diserahkan kepada tim Pokja Pengadaan barang jasa untuk melakukan lelang tender asuransi barang milik daerah sesuai dengan waktu yang ditentukan serta melakukan survei dan kelanjutan perjanjian terhadap tanah yang disewakan untuk kepentingan publik	1.522.770.197						

							Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah proses Penghapusan dan Penjualan BMD	4 kali	masih adanya beberapa OPD yang tidak melaporkan penghapusan BMD ke bidang Pengelolaan BMD	Membrintahkan kepada seluruh Kepala OPD dalam penghapusan dan penjualan BMD harus melalui bidang aset BPKD	222.890.300					
							Rekonsiliasi dalam rangka penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah aset unaudited dan audited	2 laporan	adanya batasan waktu dalam pelaksanaan Rekonsiliasi Barang Milik Daerah	mempercepat pelaksanaan rekon barang milik daerah yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang	5.951.800					
3	Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan PAD	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	5%	Program Peningkatan Pajak dan Retribusi Daerah	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan kebijakan pajak daerah	Jumlah Jenis Pajak yang didata	9 Jenis Pajak	Masih terdapatnya beberapa sumber pendapatan daerah yang belum terdata	Melakukan pendataan ulang seuruh hal-hal yang berkaitan dengan sumber-sumber pendapatan daerah	127.934.850					
							Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah kelurahan yang menjadi lokasi update data objek PBB-P2	16 kelurahan	Masih adanya beberapa data objek Pajak Yang belum terdata	Melakukan pendataan ulang objek pajak di seluruh kelurahan yang melibatkan Perangkat masing-masing lurah setempat	58.591.800					
							Penilaian Pajak Bumi dan bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan	Jumlah SPPT PBB-P2 yang didistribusikan	14000 Lembar	Target Pendapatan Daerah yang tiap tahunnya di targetkan naik sebesar 2% dari tahun sebelumnya	(1) Publikasi di radio untuk pemberitahuan kepada masyarakat tentang PBB (2) Turun ke lapangan untuk meningkatkan capaian target PBB di setiap kelurahan	94.041.500					
							Pendalian, pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Objek pajak	41 objek Pajak	Karena masih ada wajib pajak yang memberikan data tidak sesuai dengan penghasilan sebenarnya	Melakukan uji petik pada wajib pajak	108.525.800					
								Jumlah OPD pengelola retribusi	11 OPD								



RENCANA KINERJA TAHUNAN
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG
TAHUN 2023

SASARAN		RENCANA TINGKAT CAPAIAN KINERJA TRIWULAN KE-				PROGRAM		RENCANA TINGKAT CAPAIAN KINERJA TRIWULAN KE-				KEGIATAN / Sub Kegiatan	URAIAN	INDIKATOR	RENCANA TINGKAT CAPAIAN KINERJA TRIWULAN KE-				KET
SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	1	2	3	4	URAIAN	INDIKATOR	1	2	3	4				1	2	3	4	
1	2										4		5	6			8	9	
Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	Ketepatan Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai aturan	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Penyusunan Produk Anggaran yang tertib atau efisien dan tepat waktu	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	Kegiatan	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Penyusunan APBD/APBDP Kota Padang Panjang Yang tepat waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	
							Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	Sub Kegiatan	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah dokumen KUA dan PPAS	0	0	2 Dokumen	0	
								Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen KUA PPAS Perubahan	0	0	2 Dokumen	0						
								Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Dokumen Ranperda dan Perda APBD TA 2023 serta Ranperwako dan Perwako Penjabaran APBD TA 2023 dan Buku Perwako Pergeseran TA 2023 serta Dokumen Standar Biaya	0	1 Dokumen	1 Dokumen	4 Dokumen						
								Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Dokumen Ranperda dan Perda Perubahan serta Ranperwako dan Perwako Perubahan APBD	0	0	0	4 Dokumen						
												Kegiatan	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Realisasi Pencairan Anggaran Tepat Waktu sesuai RAK	26%	33%	25%	16%	
												Sub Kegiatan	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pematangan atas SP2D dengan instansi terkait	Jumlah Dokumen laporan data hasil rekonsiliasi keuangan daerah	1 Dokumen	3 Dokumen	4 Dokumen	3 dokumen	
														Jumlah rekonsiliasi pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan	1 kali	2 kali	3 kali	2 kali	

											Penyusunan Petunjuk teknis administrasi keuangan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas serta penatausahaan dan peratnggungjawaban kegiatan	Peraturan kepala daerah tentang Sistem dan Prosedur Penatausahaan Keuangan Daerah	0	0	1 Perwako	0	
										Kegiatan	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Penyusunan Laporan Keuangan Daerah yang tepat waktu dan sesuai SAP	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	
										Sub Kegiatan	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Dokumen informasi data laporan SKPD yang akurat per triwulan		1 Dokumen		1 Dokumen	
											Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD, dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun	7 Dokumen	0	0	0	
											Penyusunan Kebijakan dan Panduan teknis operasional penyelenggaraann akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen kebijakan akuntansi yang disusun	0	0	1 Dokumen	0	
											Koordinasi dan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kanupaten/ kota	Jumlah dokumen Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	0	1 Dokumen	0	1 Dokumen	

Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan PAD	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	0,1%	0,2%	0,1%	0,1%	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Peningkatan Pajak dan Retribusi Daerah	0,3%	0,7%	0,4%	0,6%	Kegiatan	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Pencapaian Pendapatan daerah dari pajak dan retribusi daerah	3,1 M	4 M	2,5 M	4,8M	
		Sub Kegiatan	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan kebijakan pajak daerah	Jumlah Jenis Pajak yang didata	3 Jenis Pajak		2 Jenis Pajak	2 Jenis Pajak	2 Jenis Pajak										
		Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah kelurahan yang menjadi lokasi update data objek PBB-P2	4 kelurahan	4 kelurahan		4 kelurahan	4 kelurahan											
		Penilaian Pajak Bumi dan bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan	Jumlah SPPT PBB-P2 yang didistribusikan	14000 Lembar	0		0	0											
			Tersedianya aplikasi e-BPHTB	1 aplikasi	0		0	0											
			Tersedianya aplikasi e-SPPT PBB-P2	1 aplikasi	0		0	0											
		Pendalian, pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Objek pajak	7 Objek Pajak	10 Objek Pajak		14 Objek Pajak	10 objek Pajak											
			Jumlah OPD pengelola retribusi	3 OPD	2 OPD		3 OPD	3 OPD											

